
Keentingan Rusia Mengirimkan Bantuan Militer ke *Libyan National Army* Pada Perang Sipil Libya Ke-2

Salsabila Aulia Putri Nasution¹⁾, Adi P. Suwecawengsa²⁾, A.A. Bagus Surya Widya Nugraha³⁾

^{1,2,3)} Hubungan Internasional /Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Universitas Udayana.

Abstrak

Keterlibatan Rusia dalam Perang Saudara Libya Kedua dapat dilihat dari bantuan militer yang dikirim ke Nasional Libya. Keputusan Rusia diambil meski berisiko melanggar embargo senjata yang diberlakukan oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan Resolusi Keamanan 1970. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk melihat kepentingan Rusia terhadap bantuan militer yang dikirimkan, juga menggunakan Neorealisme, Realisme Ofensif dan Kepentingan Nasional. perspektif. Oleh karena itu penelitian ini menyajikan penjelasan mengenai ancaman terhadap perekonomian Rusia dari hubungan Turki dengan Government of National Accord dalam dinamika The Second Libyan Civil War. Ancaman yang dirasakan kemudian memaksa Rusia untuk mendukung Tentara Nasional Libya. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan adanya kepentingan ekonomi Rusia untuk menjadikan Libya sebagai pusat bisnis di sektor Energi karena potensinya yang melimpah dan lokasinya yang strategis. akhirnya, kepentingan Rusia adalah menjadi negara adidaya baru di kawasan MENA karena minimnya intervensi dari Barat.

Kata-kunci : Libya, Kepentingan Nasional, Perang Sipil Libya ke-2, Rusia

Abstract

Russia's involvement in the Second Libyan Civil War can be seen from the military aid sent to the Libyan National. Russia's decision was taken despite the risk of violating an arm embargo imposed by the UN Security Council under Security Resolution 1970. This research which uses the qualitative descriptive method to observe Russia's interest in the military aid sent, also uses Neorealism, Offensive Realism and National Interest perspectives. This research hence presents an explanation of which there is a threat to Russia's economy from the relations between Turkey and the Governmental of National Accord in the dynamic of The Second Libyan Civil War. The perceived threat then forces Russia to support Libyan National Army. Furthermore, this research also shows that there are Russia's economic interests to make Libya the center of business in the Energy sector due to its abundant potential and strategic location. at last, Russia's interest is to become a new super power in the MENA region due to the minimum intervention from the West.

Keywords : Libya, National Interest, Russia, the Second Libyan Civil War

Kontak Penulis

Salsabila Aulia Putri Nasution (penulis 1)

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Jl. Raya Andong Gang No.33, 80571

Telp: 087892985294

E-mail: salsabilaapn03@gmail.com

PENDAHULUAN

Rusia merupakan salah satu negara yang menjalin relasi yang baik dengan Libya karena sama-sama memiliki sentimen anti Negara Barat. Rusia juga menghapuskan hutang Libya sebesar US \$4.5 miliar agar Rezim Ghadhafi dapat mengimpor alat-alat militer untuk menghadapi kompetisi negara-negara Barat (Shchedrov, 2008). Tindakan tersebut diambil Rusia demi mengamankan investasi dalam sektor energi dan infrastruktur di Libya. Namun, Rencana pembangunan serta investasi dalam berbagai sektor tersebut mengalami kendala yang cukup signifikan akibat intervensi militer NATO di tahun 2011. pada tanggal 26 Februari 2011 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi Keamanan 1970 yang menetapkan sanksi embargo terbuka pada seluruh pasokan senjata dan peralatan militer dari dan menuju Libya (Institute, 2013). Namun, Rusia yang merupakan sekutu LNA mulai mengirimkan bala bantuannya ke Libyan National Army yang berada di bawah kepemimpinan Khalifa Haftar.

Menurut data yang dipublikasikan oleh PBB, terdapat 800-1,200 tentara yang diturunkan dari Rusia ke Libya, bahkan setelah perjanjian gencatan senjata telah dilakukan (Orus-Boudjema, 2021). Selain itu, menurut Departemen Pertahanan A.S, Rusia melalui Wagner Group mengirimkan sederetan jenis persenjataan lain mulai dari missil pertahanan udara, ranjau darat, hingga kendaraan lapis baja. Sementara menurut data yang dilansir dari Center for Strategic & International Studies, Rusia mengirimkan paling tidak 14 pesawat tempur yang mencakup pesawat tempur Su-24, 6 pesawat tempur Mig-29 serta pesawat escort interceptor Su-35 dari berbagai basis di Rusia dan Suriah ke pangkalan udara Al Khadim dan Al Jufra (Bermudez, 2020). Tidak hanya itu, menurut data yang dirilis oleh Pentagon, terdapat pesawat kargo IL-76s, kendaraan peluncur rudal SA-22, truk-truk

berat, dan kendaraan anti-granat yang ditemukan di Sirte dan lapangan terbang Al Khadim di timur Benghazi (The Moscow Times, 2020). Bukti-bukti tersebut memperkuat bukti bahwa Rusia mengirimkan bantuan militer ke LNA.

Tidak hanya LNA, aktor lain yang berperan penting dalam Perang Sipil ke-2 di Libya adalah Government National Accord (GNA) yang terbentuk berdasarkan Libyan Political Agreement yang ditandatangani pada bulan Desember 2015 di Skhirat, Moroko. Pada tahun 2019, Pemerintah Turki (GNA) dan Libya menandatangani nota kesepakatan mengenai perjanjian militer dan keamanan. Dalam perjanjian tersebut, Turki menyediakan pelatihan, informasi teknis, dukungan, peningkatan, perbaikan, perawatan, pemulihan, serta alokasi kendaraan darat, udara dan laut beserta persenjataan, peralatan penting, bangunan dan basis pelatihan (Bozkurt, 2019). Melihat kedudukan Turki yang semakin menguat di Libya dengan kedekatan relasinya dengan pihak GNA pada Perang Sipil Libya ke-2, Rusia semakin gencar mengirim dukungannya kepada LNA.

Pada tanggal 3 Agustus 2020, terdapat sebuah bukti yang membenarkan adanya pesawat kargo besar An-124 Ruslan yang terbang dari Rusia menuju pangkalan udara Al Khadim di Al Marj dengan mengambil rute yang memutar wilayah Turki (Sutton, 2020). Pesawat tersebut diduga membawa sistem surface-to-air-missile (SAM) S-300 yang dapat digunakan untuk melawan kecanggihan teknologi senjata Turki.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang memiliki sifat deskriptif analisis. Menurut Lamont (2015), metode kualitatif dapat digunakan untuk mempelajari berbagai fenomena di sekitar kita dengan berfokus pada proses serta makna yang membentuk politik internasional. Penelitian

kualitatif ini akan digunakan untuk memahami tujuan Rusia mengirimkan bantuan militer ke Libyan National Army pada Perang Sipil Libya ke-2 dan tidak mengikuti sanksi embargo senjata PBB.

Penelitian ini akan memanfaatkan dan mengolah data yang berasal dari berbagai sumber buku, jurnal, skripsi dan melalui media elektronik. Data yang diperoleh akan diolah menjadi berbagai gagasan pikiran dan akan dikombinasikan untuk menghasilkan penelitian menyangkut politik internasional. Penelitian ini juga menyatukan berbagai data melalui analisa data sekunder berupa dokumen yang didapatkan secara daring.

Lamont (2015) menyatakan bahwa strategi yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif adalah melalui berbagai arsip atau dokumen, melakukan wawancara dengan narasumber yang mumpuni, serta penelitian melalui teknologi internet. Sementara unit Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah negara.

Penelitian ini akan mengolah berbagai sumber yang ada untuk kemudian dilakukan analisa. Menurut David McNabb (2010), terdapat tiga bagian untuk menginterpretasi dan menganalisis data untuk penelitian kualitatif. Pertama adalah dengan mengatur proses pengumpulan data yang meliputi praperencanaan, pemilihan secara teliti data yang akan dimasukkan ke dalam penelitian, serta memastikan bahwa data tersebut diakui oleh sebuah kelompok studi. Kedua adalah memastikan bahwa data yang telah didapatkan akan disimpan agar dapat digunakan kembali untuk analisa komparatif dan aktivitas interpretasi lainnya. Ketiga adalah proses analisa data yang terdiri atas reduksi data, penampilan data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Perang Sipil Libya

Perang Sipil Libya Pertama yang terjadi di tahun 2011 diawali dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat Libya di bawah rezim Gadhafi cenderung memburuk. Hal tersebut dikarenakan oleh ketergantungan ekonomi Libya terhadap sektor energi yang sepenuhnya dikontrol oleh negara (Laurea, 2011). Libya kemudian menjadi negara dengan pertumbuhan pasar yang rendah dibanding negara-negara produsen minyak lain di tahun 2010 menurut laporan dari Business Monitor International (BMI) (Khan & Mezran, 2013). Akibatnya, terjadi perlawanan dari rakyat sipil terhadap pemerintahan Gadhafi yang telah berlaku semena-mena dimana ribuan korban jiwa berjatuh.

Perang Sipil Libya Pertama di tahun 2011 tersebut akhirnya mendapat intervensi dari komunitas Internasional ketika dikeluarkannya resolusi no.1970 yang mengizinkan dipergunakannya kekerasan untuk responsibility to protect dan mendirikan no fly zone (Khan & Mezran, 2013). Resolusi no.1970 memberikan otoritas sepenuhnya kepada NATO untuk melakukan pengeboman di Libya.

Kondisi Politik Libya yang tidak stabil sejak dimulainya Perang Sipil Pertama, mengakibatkan sulitnya pembentukan pemerintahan Libya yang demokratis. Gejala perebutan kursi pemerintahan semakin terlihat jelas di tahun 2015, ketika ditandatanganinya Libyan Political Agreement (LPA) di tahun 2015 bertempat di Skhirat, Moroko. Perjanjian ini disponsori oleh PBB dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik kekerasan yang berkepanjangan, menghindari konfrontasi militer dan mencegah terjadinya kehancuran dalam sektor ekonomi negara. Namun, pemerintahan yang terbentuk secara darurat tersebut mendapat penolakan yang keras dari pihak anti Negara-Barat seperti dari Libyan National Army. Kedua belah pihak terpecah

dan menguasai daerah-daerah yang berbeda di Libya.

Perang Sipil Kedua di Libya mencapai titik awal persetujuan di bulan Juli tahun 2014, dimana kedua belah pihak mulai menjalankan operasi untuk saling menjatuhkan kekuasaan lawan di bawah operasi dawn dan dignity. Namun akhirnya, Perang Sipil Libya ke-2 mencapai titik terang pada bulan Oktober tahun 2020 dengan ditandatanganinya Perjanjian Gencatan Senjata di Jenewa. Perjanjian gencatan senjata tersebut pada akhirnya tercapai berkat terbentuknya tim komisi militer 5+5 yang diinisiasi usaha mediasi PBB di tahun 2019.

Perang Sipil Libya ke-2 juga melibatkan salah satu aktor lain, yakni Turki yang secara terbuka mengakui intervensinya di Libya dan memilih untuk mendukung sisi GNA. Keseriusan Turki dalam membantu GNA pada Perang Sipil Libya ke-2 dapat dilihat dari bantuan militer Turki dalam bentuk 8 Bayraktar TB2 Drones yang membantu GNA dalam melakukan serangan udara di kota Gharyan (Iddon, 2019). Adanya drone tersebut memberikan kerusakan terhadap 2 pesawat transportasi militer 11-76 milik LNA. Turki dan GNA juga menandatangani nota kesepakatan untuk kerja sama militer pada bulan Juli, tahun 2020.

Ancaman Kepentingan Energi Rusia di Turki

Menurut pandangan realisme ofensif, suatu negara sebagai entitas bebas dapat mengasumsikan tindakan negara lain sebagai ancaman terhadap kepentingan negaranya. Melalui pandangan tersebut, tindakan Rusia untuk mengirimkan senjata ke LNA di Libya dapat diasumsikan karena kepentingan Rusia di Turki terancam oleh kedekatan relasi Turki dengan GNA. Kepentingan Rusia yang terancam tersebut merupakan salah satu proyek Rusia yang sangat ambisius di Turki,

yakni proyek Turk Stream. Pembangunan proyek Turk Stream tertuang dalam Memorandum of Understanding yang ditandatangani oleh Rusia dan Turki di tahun 2015.

Meskipun telah menjalin kerja sama dengan Rusia, Turki ternyata memiliki ambisi untuk menjadi sebuah negara yang mandiri dalam sektor energi. Turki yang sangat bergantung pada Rusia dalam pemenuhan suplai LNG kemudian melakukan perjanjian dengan GNA. Perjanjian inilah yang menjadi ancaman untuk kepentingan Rusia di Turki. Dengan menandatangani perjanjian batas maritim dengan GNA, Turki mendapatkan hak atas Zona Ekonomi Eksklusif yang melewati pulau Crete sebesar 41,000 m persegi yang bebas untuk dieksplorasi dan dieksploitasi sumber dayanya. Turki juga memperoleh izin untuk melakukan eksplorasi dan pengeboran minyak di tujuh area di laut Mediteran. Eksplorasi dan Pengeboran dilakukan pemerintah Turki di bawah Turkish Petroleum.

Menurut teori Neorealisme, Rusia melihat perjanjian antara Libya dan Turki sebagai sebuah ancaman bagi kepentingan negaranya, terutama dalam kepentingan ekspor gas alam Rusia di Turki. Ketakutan dan kewaspadaan Rusia bukanlah tanpa bukti, perjanjian batas maritim Turki dengan Libya mengakibatkan turunnya presentase impor gas alam dari Rusia sebanyak 44.8% di awal tahun 2020 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 (Kaya, 2020). Rusia juga kehilangan peredikatnya sebagai eksportir LNG terbesar di Turki menjadi nomer ke-4. Meskipun harus mengambil resiko untuk melawan embargo persenjataan, Rusia telah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga kepentingannya, Rusia harus dapat menunjukkan usahanya untuk memberikan kerugian terhadap Turki sebagai negara yang berpotensi menjadi musuh atau saingan.

Motif Kepentingan Ekonomi dan Energi Rusia di Libya

Libya menjadi salah satu negara kaya sumber daya alam yang diincar oleh Rusia sejak lama. Bahkan sebelum tumbangannya rezim Gadhafi, salah satu perusahaan minyak terbesar no.6 milik Rusia, Tatneft telah masuk dan berkecimpung dalam industri minyak di Libya pada tahun 2006. Tidak hanya Tatneft yang berusaha untuk mendapatkan sumber daya energi milik Libya, namun juga Gazprom. Pada tahun 2008, Gazprom memiliki hak atas 49% dari Joint Venture dengan perusahaan Wintershall DEA yang telah menjadi operator dari dua blok minyak di Libya.

Kapabilitas luar biasa dalam memproduksi energi menjadikan Libya salah satu negara yang sangat bergantung pada sektor minyak bumi sejak tahun 1960an. Sektor minyak berkontribusi sebesar 91% dari pendapatan pemerintah di tahun 2007 dan menyumbang sebesar 90% dari komoditas ekspor negara dari periode 1970-2007 (Ali & Harvie, 2013). Sektor minyak pun menjadikan Libya sebagai salah satu negara berkembang yang mempunyai kredibilitas dalam negosiasi mengenai harga minyak di kancah internasional. Libya juga merupakan negara produsen minyak terbesar nomer dua di benua Afrika di tahun 2020 menurut laporan yang dipublikasi oleh OPEC (Biesold, 2021). Tidak hanya itu, menurut sebuah laporan yang dipublikasikan oleh USA Today, Libya juga menjadi negara dengan cadangan minyak bumi terbesar nomer 10 di dunia dengan total mencapai 48.4 miliar barel (Stebbins, 2019), Libya menjadi salah satu negara yang membentuk The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) di tahun 1962 karena kontribusinya yang besar pada ekspor minyak mentah.

Usaha Rusia dalam mempengaruhi Kawasan Afrika Utara

Keterlibatan Rusia dalam Perang Sipil Libya ke-2 tidak dapat terlepas dari keinginan kuat untuk dapat menjadi aktor penting yang memiliki pengaruh signifikan dalam Kawasan Afrika Utara. Melalui hard power yang ditunjukkan dari bantuan militer berupa suplai persenjataan, Rusia menunjukkan bahwa negaranya dapat menjadi partner yang kredibel untuk negara-negara di Afrika Utara, termasuk Libya.

Keinginan Rusia untuk menjadi hegemon baru di Kawasan Afrika Utara juga adalah untuk mempromosikan visinya menjadi oposisi terhadap Negara Barat. Dalam pandangan Rusia, salah satu cara terbaik untuk menyelesaikan ketidakstabilan dalam kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara adalah dengan menggunakan kekuatan otoriter dan hard power, sebagaimana pendekatan Rusia pada masa Uni Soviet. Pendekatan liberal yang mengatasnamakan perdamaian oleh Negara Barat dianggap tidak sesuai dengan kondisi serta latar belakang dari negara-negara di Afrika Utara. Dengan ikut terlibat dan mengirimkan bantuan persenjataan ke daerah yang berkonflik di kawasan Afrika Tengah, Rusia menunjukkan dukungannya terhadap pihak yang ingin membangun rezim otoriter dan memiliki tujuan untuk meruntuhkan pemerintahan boneka yang didalangi oleh Negara Barat.

Salah satu hasil nyata dari strategi Rusia untuk meningkatkan dominasinya di negara-negara pada kawasan Afrika Utara dapat dilihat dari digelarnya The First Russia-Africa Summit yang digelar pada bulan Oktober 2019 di Sochi (Paczyńska, 2020). Konferensi tersebut berfokus pada tujuan untuk meningkatkan hubungan politik, perdagangan komersial serta keamanan antara Presiden Vladimir Putin

dengan 43 kepala negara lainnya. Di tahun yang sama, Rusia juga telah menandatangani perjanjian militer dengan 21 negara Afrika yang lain meliputi Angola, Chad, Ethiopia, Nigeria, Tanzania, dan Zimbabwe, bahkan hingga negosiasi dengan Madagaskar, Mozambik dan Sudan (Paczyńska, 2020). Banyaknya jumlah perjanjian tersebut didukung oleh rasa antusias negara-negara Afrika untuk menerima bantuan dari Rusia alih-alih bekerja sama dengan Tiongkok yang juga mencoba untuk mendominasi kawasan Afrika.

Sebagai salah satu negara super power, Rusia ingin membuktikan bahwa negaranya dapat menunjukkan posisi yang lebih kuat bahkan di luar kawasannya sendiri. Posisi yang kuat menjadikan Rusia sebagai negara yang 'dicari' oleh negara lain ketika terdapat suatu permasalahan. Jadi dengan demikian, akan memberikan posisi yang lebih dekat untuk Rusia bekerja sama dengan pemimpin dari negara di Afrika Utara daripada pemimpin negara di Afrika Utara bekerja sama dengan Negara Barat lain.

Terakhir, Rusia dengan sentimen anti Negara Baratnya, harus bersiap dengan segala sanksi dan embargo yang akan dikenakan oleh Negara-Negara Barat. Terutama ketika banyak tindakannya yang dinilai melawan norma internasional. Sebelum Perang Sipil Libya terjadi, Rusia sedang menghadapi banyak sanksi dari A.S dan Uni Eropa akibat agresinya di Krimea. Akibat dari isolasi dunia internasional terhadap Rusia, pengiriman bantuan militer Rusia ke LNA merupakan usaha Rusia untuk menanamkan investasi dan mencari sumber finansial yang berasal dari segala sumber yang mungkin bisa didapatkan selain dari Negara-Negara Barat.

PENUTUP

Penelitian ini menjelaskan tiga kepentingan Rusia mengirimkan bantuan

militer ke LNA pada Perang Sipil Libya ke-2 yang juga diwarnai dengan intervensi dari negara-negara lain, seperti Turki. Pertama, Rusia melihat kedekatan relasi antara Turki dan GNA pada Perang Sipil Libya Ke-2 sebagai sebuah ancaman terhadap proyek ambisius Rusia yakni Turk Stream di Turki. Kedua, Rusia memiliki motif ekonomi dalam tindakannya yang ingin melanjutkan kembali investasi yang telah direncanakan untuk Libya sejak periode pemerintahan Ghaddafi. Terakhir, Rusia menunjukkan usahanya untuk mempengaruhi kawasan Afrika Utara.

Daftar Pustaka

- Afridi, M. K., & Jibrán, A. (2018). Russian Response to Syrian Crisis: A Neorealist Perspective. *Strategic Studies*, 38(2), 15.
- Ali, I., & Harvie, C. (2013). Oil and economic development: Libya in the post-Gaddafi era. *Economic Modelling*, 32, 273-285.
- Bermudez, J. (2020). Moscow's Next Front: Russia's Expanding Military Footprint in Libya | Center for Strategic and International Studies. In Center for Strategic & International Studies. <https://www.csis.org/analysis/moscows-next-front-russias-expanding-military-footprint-libya>
- Biesold, D. (2021, November 15). Libya Becomes Africa's Largest Oil Producer. *Energy Capital & Power*. <https://energycapitalpower.com/libya-becomes-africas-largest-oil-producer/>
- Bozkurt, A. (2019, December 16). Full text of new Turkey, Libya sweeping security, military cooperation deal revealed - Nordic Monitor. *Nordic Monitor*. <https://nordicmonitor.com/2019/12/full-text-of-new-turkey-libya-sweeping-security-military-cooperation-deal-revealed/>

- McNabb, D. E. (2010). Research methods for political science: quantitative and qualitative approaches. 425.
- Iddon, P. (2019, October 14). Turkey is fighting a formidable drone war in Libya. Ahval News. <https://ahvalnews.com/libya/turkey-fighting-formidable-drone-war-libya>
- Institute, S. I. P. R. (2013). UN arms embargo on Libya (Issue September 2011). https://www.sipri.org/databases/embargoes/un_arms_embargoes/libya/libya_2011
- Kaya, N. E. (2020, August 24). Turkey's gas imports from Russia and Iran fall sharply. Anadalu Agency. <https://www.aa.com.tr/en/economy/turkey-s-gas-imports-from-russia-and-iran-fall-sharply/1951397>
- Khan, M., & Mezran, K. (2013). The Libyan economy after the revolution: still no clear vision. Atlantic Council, Rafik Hariri Center for the Middle East.
- Laurea, T. (2011). Libya Before and After Gaddafi: An International Law Analysis. <http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/2506/817727-1165480.pdf?sequence=2>
- Orus-Boudjema, S. (2021). Libya: Why are there more than 20,000 fighters from Russia, Syria and Chad? The Africa Report. <https://www.theafricareport.com/108275/libya-why-are-there-more-than-20000-fighters-from-russia-syria-and-chad/>
- Paczyńska, A. (2020). Russia in Africa: Is great power competition returning to the continent? (No. 15/2020). Briefing Paper.
- Shoib, M. (2016). Turkish Intervention in The Libyan Civil War: Aims and Challenges. *Journal of Strategic Affairs*, 33–61.
- Stebbins, S. (2019, May 22). The largest oil reserves in the world are found in these 15 countries. USA Today. <https://www.usatoday.com/story/money/2019/05/22/largest-oil-reserves-in-world-15-countries-that-control-the-worlds-oil/39497945/>
- Sutton, H. (2020, August 6). Game Changer: Russia May Have S-400 Air Defense System In Libya. *Forbes*. <https://www.forbes.com/sites/hisutton/2020/08/06/game-changer-russia-may-have-deployed-s-400-missiles-to-libya/?sh=9754b0250ecd>
- Tekir, G. (2020). Russian-Turkish Involvement in the Civil War in Libya. - *Turkish Journal of Russian Studies*, 3(3), 190–215.
- U.S. Says Photos Show Russian Arms Supplies to Libya Rebels - *The Moscow Times*. (2020, July 24). *The Moscow Time*. <https://www.themoscowtimes.com/2020/07/24/us-says-photos-show-russian-arms-supplies-to-libya-rebels-a70976>